

REFORMASI ADMINISTRASI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Sudaryanto

Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Pekanbaru

Abstrak : Kecamatan Kandis merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Minas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 41 Tahun 2002, yang berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten lainnya. Kondisi saat ini yang menjadi permasalahan adalah diperlukan layanan satu atap untuk tingkat kecamatan. Berdasarkan kondisi yang ada di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak, layanan terpadu masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tujuan Reformasi Administrasi di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak, pertama. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Tujuan Reformasi Administrasi di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak. Metode penelitian diawali dari penentuan lokasi yakni Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Camat dan masyarakat. Camat dijadikan sebagai *Key Informance*. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus untuk aparatur pemerintah dan teknik aksidental untuk masyarakat. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sedangkan tehnik pengumpulan data secara survey, kuestioner dan wawancara. Data yang telah terkumpul berdasarkan jenis dan bentuk data, untuk selanjutnya data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa reformasi administrasi di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukan pembangunan gedung baru sekaligus pemindahan dari gedung lama ke gedung baru yang lebih representatif. Begitu pula dengan jika dikaitkan dengan konsep teori yang dipakai. Kesimpulan dari penelitian ini pertama; reformasi administrasi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Kedua, faktor penghambat dalam reformasi administrasi adalah Pengenalan dan penggalakkan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Hal ini sudah dilakukan hanya saja masih terbatas pada penggunaan E-KTP. Sementara untuk urusan lain seperti kartu keluarga dan surat tanah belum berjalan.

Kata Kunci: Reformasi, Administrasi dan Kandis

Abstract : *Subdistrict Kandis is a result of the expansion of Minang sub-district, based on the Siak District Regulation No. 41 of 2002, which is bordered by the districts and other districts. Current conditions that the problem is required one-stop service to the district level. Based on the existing conditions at the Head Office Kandis Siak, integrated services are still not going well. Therefore, it is necessary to study in order to determine and analyze how the objective of Administrative Reform in Kandis Siak District Office, first.*

Second, to determine and analyze obstacles in the implementation of administrative reforms aim at Kandis Siak District Office.

Initiated research method of determining the location of Kandis Siak District Office. The population in this study is the Head Office employees and the community. Camat used as Key Informant. The sampling technique use discensus for government apparatus and techniques for public accidental. Source and type of data used are primary and secondary. While the technique of data collection surveys, questionnaire and interviews. The data have been collected based on the type and form of data, for subsequent qualitative data is analyzed descriptively.

Of the research activities conducted in mind that the administrative reform in Kandis Siak District Office has been going well. This proved one of the new building at the same time made the removal of the old building to the new building which is more representative. Similarly, if it is associated with the concept of theory used.

The first conclusion from this study; administrative reform in the District Kandis Siak already well underway. Secondly, factors inhibiting the administrative reform is introduction and promotion of the merit system, the use of PPBS, processing the data through automated information systems, increased use of scientific knowledge and others. This has been done only limited to the use of e-ID card. As for other matters such as family card and land document have not been running.

Keywords: *Reform, Administration and Kandis*

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Kandis merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Minas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 41 Tahun 2002, yang berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten lainnya.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan teroris mebaik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan

(termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ketahun dan terpadu.

Oleh karena itu diperlukan layanan satu atap untuk tingkat kecamatan. Berdasarkan kondisi yang ada di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak, layanan terpadu masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari pernyataan salah seorang staf kecamatan bahwa mereka kesulitan dalam memberikan pelayanan dikarenakan fasilitas yang belum memadai.

Namun berdasarkan kondisi yang ada di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak, masih terdapat kendala dari segi fasilitas layanan terpadu yang belum memadai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dror dalam Soesilo (2012), berpendapat bahwa reformasi pada

hakekatnya merupakan usaha yang berorientasi pada tujuan jamak. Ia mengklasifikasikan tujuan reformasi ke dalam 6 kelompok, 3 bersifat intra administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi.

Tiga tujuan internal reformasi administrasi yang dimaksud meliputi:

- a. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain.
- b. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain.
- c. Pengenalan dan penggalakkan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah:
- d. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.
- e. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. Misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan.
- f. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Camat dan masyarakat. Camat dijadikan sebagai *Key Informance*. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus untuk aparaturnya pemerintah dan teknik aksidental untuk masyarakat.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner.

Data yang telah terkumpul berdasarkan jenis dan bentuk data, untuk selanjutnya data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

D. HASIL YANG DICAPAI

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa reformasi administrasi di Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukan pembangunan gedung baru sekaligus pemindahan dari gedung lama ke gedung baru yang lebih representatif. Begitu pula dengan jika dikaitkan dengan konsep teori yang dipakai.

Dror dalam Soesilo (2012), mengatakan reformasi administrasi dapat dilihat dalam 6 kelompok, 3 bersifat intra administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi.

E. Pembahasan

5.1 Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain.

5.2 Penghapusan Kelemahan

Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain sudah berkurang dari sebelumnya. Artinya, tetap ada tapi dalam jumlah relatif yang lebih sedikit. Seperti untuk pertemanan masih berlaku.

5.3 Pengenalan Dan Penggalakkan Sistem Merit

Pengenalan dan penggalakkan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Hal ini sudah dilakukan hanya saja masih terbatas pada penggunaan E-KTP. Sementara untuk urusan lain seperti kartu keluarga dan surat tanah belum berjalan.

5.4 Menyesuaikan Sistem Administrasi Terhadap Meningkatnya Keluhan Masyarakat.

Keluhan masyarakat terhadap layanan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar namun ini sudah bisa diatasi dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan jawaban responden sebagai tertuang dalam tabel.

5.5 Mengubah Pembagian Pekerjaan Antara Sistem Administrasi Dan Sistem Politik.

Misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan. Administrasi dan politik dua sisi yang sangat berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Meski demikian kondisinya untuk Kecamatan Kandis relatif lebih stabil dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebab kondisi masyarakat Kecamatan Kandis yang heterogen tapi administrasi dan politik tidak menimbulkan polemik.

5.6 Mengubah Hubungan Antara Sistem Administrasi Dan Penduduk

Misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain).

Hubungan sentralisasi, desentralisasi, demokratisasi dan lainnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

F. KESIMPULAN

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan:

1. Reformasi administrasi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik.
2. Faktor penghambat dalam reformasi administrasi adalah Pengenalan dan penggalakkan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Hal ini sudah dilakukan hanya saja masih terbatas pada penggunaan E-KTP. Sementara untuk urusan lain seperti kartu keluarga dan surat tanah belum berjalan.

G. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terlaksana sistem merit (kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya) dan PPBS (*Pusat Pelayanan Basic Science*).
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis sistem merit dan PPBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhammadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKIPRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Imam Robandi, 2008, *Becoming The Winner “Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah dan Prsentasi”*, Andi, Yogyakarta.
- Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Soesilo Zauhar, 2012, *Reformasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2008, *Statistik Non Parametris*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

